

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Visi Indonesia Sehat 2010, ditandai dengan penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Salah satu masalah penting yang dihadapi untuk mewujudkan visi tersebut adalah penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), atau yang lebih populer dengan sebutan narkoba, terutama di kalangan generasi muda. Dari tujuh problem utama kesehatan remaja, yaitu merokok, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan, keselamatan di jalan, kesehatan seksualitas, aktifitas fisik, gizi dan berat badan dan bunuh diri, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan menempati peringkat tertinggi dan merupakan tantangan paling besar dalam masalah kesehatan dan sosial.

Dari laporan perkembangan situasi narkoba dunia tahun 2014, diketahui angka estimasi pengguna narkoba di tahun 2012 adalah antara 162 juta hingga 324 juta orang atau sekitar 3,5%-7%.¹ Perbandingan estimasi prevalensi tahun 2012 (3,5%-7%)² dengan estimasi tahun 2010 yang kisarannya 3.5%-5.7% menunjukkan kecenderungan prevalensi penyalahgunaan narkoba relatif stabil.

¹ United Nation Office on Drugs and Crime. 2010. World Drug Report 2014 https://www.unodc.org/documents/wdr2014/World_Drug_Report_2014_web.pdf. diunduh 7 Maret 2017 pukul 11.35 WIB

² *Ibid.*

Jenis yang paling banyak digunakan adalah ganja, opiod, cocain atau type amphetamine dan kelompok stimulant. Penggunaan polydrugs yang merupakan campuran penggunaan dari dua zat atau lebih secara bersamaan baik menjadi perhatian yang serius baik konsekuensi kesehatan masyarakat dan kaitannya dengan program pengendalian peredaran narkoba.³

Diperkirakan jumlah penyalahguna narkoba sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang atau sekitar 2,10% sampai 2,25% dari total seluruh penduduk Indonesia yang berisiko terpapar narkoba di tahun 2014. Jika dibandingkan studi tahun 2011, angka prevalensi tersebut relatif stabil (2,2%) tetapi terjadi kenaikan bila dibandingkan hasil studi tahun 2008 (1,9%). Hasil proyeksi perhitungan penyalahguna narkoba dibagi menjadi 3 skenario, yaitu skenario naik, skenario stabil, dan skenario turun. Pada skenario naik, jumlah penyalahguna akan meningkat dari 4,1 juta (2014) menjadi 5,0 juta orang (2020). Sementara bila skenario turun akan menjadi 3,7 juta orang (2020). Kontribusi jumlah penyalahguna terbesar berasal dari kelompok pekerja, karena memiliki kemampuan finansial dan tekanan kerja yang besar sehingga tingkat stress tinggi. Penyalahguna coba pakai memiliki proporsi terbesar, terutama dari kelompok pelajar/mahasiswa. Sementara itu, pada kelompok pecandu suntik, polanya cenderung stabil untuk 7 tahun ke depan. Hal yang perlu dikhawatirkan pada

³ Laporan Survei Perkembangan Penyalahguna Narkoba di Indonesia Tahun Anggaran 2014, Jakarta: Badan Narkotika Nasional, hal. 1.

penyalahguna narkoba suntik adalah pemakaian bersama alat suntik yang beresiko tinggi tertular penyakit hepatitis dan HIV/AIDS.⁴

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkoba tersebut.

Polres Boyolali akan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba di kalangan pelajar di Boyolali. Kasus penyelundupan sabu-sabu oleh dua orang pelajar di Boyolali, KAS, 17, warga Ampel dan Bob, 17, warga Boyolali ke dalam Rutan Boyolali pada Rabu (24/8/2016) sore, menjadi perhatian kepolisian karena merupakan kasus narkoba pertama yang melibatkan anak di bawah umur. Saat ini, kasus tersebut masih diselidiki. KAS dan Bob belum ditetapkan sebagai tersangka bahkan kemungkinan tidak akan ditahan karena masih anak-anak. Penyidik masih mendalami peran keduanya termasuk akan minta pendapat BNN untuk menetapkan pasal yang tepat bagi dua pelaku. Berdasarkan tes urine, dua pelajar dinyatakan positif pengguna narkoba. Bahkan KAS dan Bob mengaku mengonsumsi narkoba dua hari sebelum tertangkap. Kapolres berharap tertangkapnya KAS dan Bob bisa membongkar jaringan peredaran narkoba di

⁴ *Ibid*, hal viii

kalangan pelajar. Mereka mencoba menyelundupkan sabu-sabu untuk seorang tahanan kasus narkoba bernama Yusuf Eko, warga Poncol, Mukiran, Kaliwungu, Semarang.⁵

Kejahatan narkoba masih menjadi masalah darurat yang menimpa Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk menekan laju perkembangan penyalahgunaan narkoba yang telah merenggut banyak nyawa dan masa depan anak bangsa ini. Banyaknya penyalahgunaan Narkoba oleh remaja masih menjadi momok yang menakutkan bagi bangsa. Diundangkannya Undang-Undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba menjadi dasar penanganan Tindak Pidana Narkoba untuk menggantikan Undang-undang no 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba.

Begitu pula dengan penanganan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang dilakukan pelajar. Peraturan perundang-undangan tidak dapat diterapkan begitu saja, namun harus menggunakan prosedur tertentu, sehingga pelaku penyalahgunaan narkoba oleh pelajar akan mendapatkan perlindungan khusus oleh hukum serta dapat dilihat dari kajian seberapa besar ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh pelajar.

Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul:

“Penanganan Tindak Pidana Narkoba Terhadap Pelajar di Kabupaten Boyolali”

⁵ <http://www.solopos.com/2016/08/25/narkoba-boyolali-polres-gandeng-bnn-ungkap-jaringan-pengedar-ss-pelajar-747598>, diunduh 4 April pukul 10.26 WIB

B. Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Regulasi mengenai Tindak Pidana Narkoba terhadap Pelajar di Boyolali ?
2. Bagaimana Penanganan Tindak Pidana Narkoba terhadap Pelajar di Kabupaten Boyolali ?
3. Apa Hambatan-hambatan yang ditemui dalam upaya Penanganan Tindak Pidana Narkoba terhadap Pelajar di Kabupaten Boyolali ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian :

1. Untuk mengetahui Regulasi Tindak Pidana Narkoba di Boyolali.
2. Untuk mendiskripsikan Penanganan Tindak Pidana Narkoba terhadap Pelajar di Kabupaten Boyolali.
3. Untuk mendiskripsikan Hambatan-hambatan yang muncul dalam upaya Penanganan Tindak Pidana Narkoba terhadap Pelajar di Kabupaten Boyolali.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Untuk menambah pengetahuan pengembangan ilmu pidana.
- b. Sebagai bahan informasi dan referensi untuk kalangan akademisi yang akan melakukan penelitian penanganan tindak pidana narkoba terhadap pelajar.

2. Manfaat Praktis:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya penanganan tindak pidana narkoba terhadap pelajar.
- b. Sebagai bahan masukan dalam upaya penanganan terhadap tindak pidana narkoba terhadap pelajar.

E. Kerangka Pemikiran

Secara Etimologi Narkotika berasal dari kata “Narkoties” yang sama artinya dengan kata “Narcosis” yang berarti membius.⁶

Menurut Smith Klise dan French Clinical Staff mengatakan bahwa: ”Narcotics are drugs which produce insensibility stupor due to their depressant effect on the central nervous system. Included in this definition are opium derivatives (morphine, codein, heroin, and synthetic opiates (meperidine, methadone)).”⁷ Yang artinya kurang lebih sebagai berikut: Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksamaan atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan-turunan candu (Morphine, Codein, Heroin), candu sintesis (Meperidine, Methadone).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelajar diartikan sebagai anak sekolahan (terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan), peserta didik. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

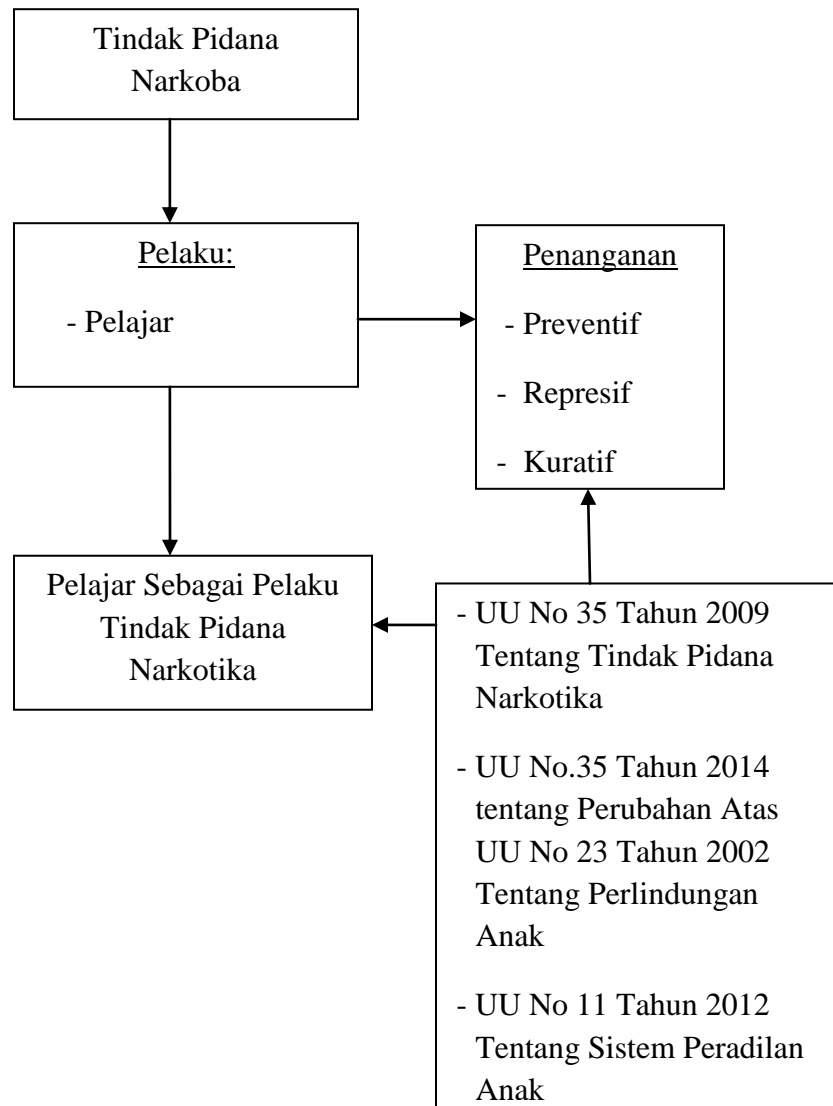
Tindak Pidana Narkotika dengan pelaku pelajar tentunya akan mengganggu pendidikan, kesehatan dan perkembangan fisik, mental, spiritual

⁶ Muhammad Taufik Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal.21.

⁷ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hal.33.

dan moral sosial pelajar. Penanganan Hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang dilakukan pelajar harus mendapatkan perlakuan yang khusus mengingat pelaku masih berstatus pelajar. Peraturan perundang-undangan tidak dapat diterapkan begitu saja, namun harus menggunakan prosedur tertentu, sehingga pelaku penyalahgunaan narkoba oleh pelajar akan mendapatkan perlindungan khusus oleh hukum serta dapat dilihat dari kajian seberapa besar ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh pelajar. Mengingat pelajar adalah generasi penerus cita-cita bangsa dan negara, mereka harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, berpendidikan, bertanggungjawab, bermoral tinggi serta berwatak terpuji.

Masih Tingginya penyalahgunaan Narkoba dalam kalangan Pelajar, dan besarnya akibat buruk yang ditimbulkan, maka timbullah motivasi penulis untuk menulis tentang Penanganan Tindak Pidana Narkoba dengan Pelaku Pelajar di Kabupaten Boyolali sebagai penelaahan terhadap upaya Represif yang dilakukan para penegak hukum dalam penanganan tindak pidana Narkoba dengan Pelaku Pelajar. Kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :



F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian seyogyanya selalu

meningkatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.⁸ dalam melakukan suatu penelitian agar tercapainya sasaran dan tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif,⁹ yaitu untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapunya tentang norma-norma penanganan tindak pidana narkoba dengan pelaku pelajar dan hambatan-hambatan baik secara Yuridis maupun Empiris, khususnya di Kabupaten Boyolali.

2. Metode Pendekatan

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis dan empiris, dari sisi yuridis penelitian akan mengkaji tentang peraturan hukum yang berlaku dan dijadikan landasan dalam penanganan Tindak Pidana Narkoba terhadap pelajar secara nasional maupun di Kabupaten Boyolali. Sisi empirisnya penelitian ini bermaksud mendiskripsikan bagaimana praktik penanganan Tindak Pidana Narkoba terhadap Pelajar di Kabupaten Boyolali dan hambatannya.

⁸ Kudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. hal. 3.

⁹ Bambang Sunggono. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal. 35. "Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu."

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kabupaten Boyolali. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan dilakukan penelitian.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dari lokasi penelitian di Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (BP3AKB), untuk mendapatkan informasi bagaimana perlindungan pelajar yang melakukan tindak pidana narkoba di Kabupaten Boyolali, Polres Boyolali untuk mengetahui bagaimana penanganan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Pelajar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, untuk mendapatkan informasi bagaimana tindakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali terhadap pelajar yang melakukan tindak pidana narkoba, Kejaksaan Negeri Kabupaten Boyolali, untuk mendapatkan informasi bagaimana tuntutan yang diberikan kepada Pelajar yang melakukan tindak pidana narkoba, Pengadilan Negeri Kabupaten Boyolali, untuk mengetahui proses penanganan perkara tindak pidana narkoba terhadap Pelajar, Sekolah di Kabupaten Boyolali, untuk mendapatkan

informasi bagaimana tindakan pihak Sekolah terhadap Pelajar yang melakukan tindak pidana narkoba.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan pustaka yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan - ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- c) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- d) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- e) UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil penelitian yang terkait dengan Penanganan Tindak Pidana Narkoba terhadap Pelajar sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan penulis, maka penulis dalam melakukan penelitian menggunakan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang terkait dengan Penanganan Tindak Pidana Narkoba terhadap Pelajar.

b. Studi Wawancara

Peneliti melakukan wawancara langsung dilakukan dengan pihak-pihak yang berkompeten guna memperoleh keterangan data tentang subjek dan objek yang diteliti, yaitu dengan BP3AKB, Polres Boyolali, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, Kejaksaan Negeri Boyolali, Pengadilan Negeri Kabupaten Boyolali dan Sekolah yang direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali. Item-item pertanyaan yang diajukan antara lain: 1) Bagaimana Perlindungan yang diberikan oleh BP3AKB kepada pelajar yang melakukan penyalahgunaan narkoba; 2) Bagaimana penanganan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelajar yang dilakukan Polres Kabupaten Boyolali; 3) Apa tuntutan yang diberikan

kepada Pelajar yang melakukan tindak pidana narkoba; 4) Bagaimana proses penanganan perkara tindak pidana narkoba terhadap Pelajar di Pengadilan Negeri Kabupaten Boyolali 5) Bagaimana tindakan pihak Sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali terhadap Pelajar yang melakukan tindak pidana narkoba; 6) Apa hambatan-hambatan yang ditemui dalam upaya penanganan tindak pidana narkoba terhadap Pelajar di Kabupaten Boyolali.

6. Metode Analisa

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dianalisis dan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.¹⁰ Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian.

Tahap kedua akan dilakukan pembahasan berupa pengujian terhadap taraf sinkronisasi, antara berbagai data sekunder (peraturan perundang-undangan) yang telah diinventarisir, yang menjadi objek penelitian. Pada pembahasan tahap kedua ini, penarikan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, dengan ketentuan:

¹⁰ Kudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta . hal. 38.

- a. Peraturan perundang-undangan lain yang ada (disamping juga doktrin dan teori hukum), dijadikan sebagai premis mayornya,
- b. Data sekunder yang lain serta data primer yang terkait, sebagai premis minornya,
- c. Konklusi akan diambil dengan melihat ada tidaknya kesinkronan dan kesesuaian diantara data sekunder yang lain serta data primer yang terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin dan teori hukum yang ada.

Analisis empiris yang akan digunakan adalah data yang didapat dari wawancara dan data yang diberikan oleh narasumber, akan dianalisis secara empiris kualitatif, terutama model analysis constant comparative, rationalistic comparative dan kualitatif-logis. Teknik analisis dilakukan dengan menggunakan metode theoritical Intepretation, serta diskusi interprestasi, dengan pola pikir secara induktif-deduktif dan pola penalaran secara rasionalismesillogisme, yang kemudian akan dilanjutkan dengan analisis secara normatif kualitatif dengan model legal intepretation dan theoritical intepretation.¹¹

G. Sistematika Skripsi

Peneliti skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara sistematis, dimana diantara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian

¹¹ Kudzalifah Dimyati dan Kelik Wardiono, “*Pola Pemikiran Hukum Responsif*”, 2006, hal. 11.

yang berkesinambungan. Sistematika dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Di sini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Dan Sistematika Skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka, yang didalamnya menguraikan tentang tinjauan umum tentang Tindak Pidana, tinjauan umum tentang Penanganan Tindak Pidana Narkotika, dan tinjauan umum tentang Anak.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai: 1) Bagaimana Regulasi mengenai Tindak pidana narkoba di Boyolali; 2) Bagaimana penanganan tindak pidana narkoba terhadap pelajar di Kabupaten Boyolali; 3) Apa hambatan-hambatan yang ditemui dalam upaya penanganan tindak pidana narkoba terhadap pelajar di Kabupaten Boyolali.

BAB IV Penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.